

SEIKEREI RITUAL AS A TECHNOLOGY OF POWER: DECONSTRUCTING SHINTO CULTURAL HEGEMONY DURING THE JAPANESE OCCUPATION OF INDONESIA**RITUAL SEIKEREI SEBAGAI TEKNOLOGI KEKUASAAN: DEKONSTRUKSI HEGEMONI BUDAYA SHINTO DALAM PENDUDUKAN JEPANG DI INDONESIA****Linuwih Prihartanto**

Program Studi Studi Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Corresponding Author*ABSTRACT**

This paper examines the practice of Seikeri during the Japanese occupation of Indonesia (1942–1945) as part of a colonial power strategy operating through symbolic and ideological domains. Following the decolonization of Dutch rule, Japan mobilized State Shinto not merely as a religion but as a colonial political instrument for constructing new hegemonic relations. Employing a theoretical framework that combines Foucauldian power analysis—particularly the concepts of political technology and body discipline—with Gramscian hegemony and consensus theory, this study argues that Seikeri functioned as a dual deconstructive mechanism, simultaneously dismantling residual European hegemony and constructing new consensus through the sacralization of the Japanese state and the symbolic discipline of everyday life. This research adopts a qualitative approach based on library research (literature study) and critical discourse analysis of historical and theoretical sources, examining ritual performativity, symbolic semiotics, collective bodily discipline, the occupation of public space, and the articulation of the Hakko Ichiu ideology. The findings show that Seikeri operates as a technology of power that disciplined bodies, sacralized public space, and produced ideological consensus, while also opening space for local negotiation and symbolic resistance that rendered colonial hegemony inherently unstable and contested. This paper contributes conceptually to the study of Indonesian colonial history and religious studies by highlighting the role of ritual as a primary medium in the production and reproduction of power, while enriching power theory within the context of East Asian colonialism.

Keywords:*Seikerei; Shinto; technology of power; cultural hegemony; symbolic colonialism; Japanese occupation of Indonesia.*

ABSTRAK

Paper ini mengkaji praktik Seikerei dalam konteks pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942–1945 sebagai bagian dari strategi kekuasaan kolonial yang bekerja melalui ranah simbolik dan ideologis. Dalam konteks dekolonisasi dari Belanda, Jepang memobilisasi State Shinto bukan semata sebagai agama, melainkan sebagai instrumen politik kolonial untuk membangun hegemoni baru. Dengan kerangka teoritis yang memadukan analisis kekuasaan Foucault—khususnya konsep teknologi politik dan disiplin tubuh—serta teori hegemoni dan konsensus Gramsci, tulisan ini berargumen bahwa Seikerei berfungsi sebagai mekanisme dekonstruktif ganda yang secara simultan mendekonstruksi sisa-sisa hegemoni Eropa dan mengonstruksi konsensus baru melalui sakralisasi negara Jepang serta pendisiplinan simbolik kehidupan sehari-hari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka (library research) dan analisis wacana kritis atas sumber-sumber historis dan teoritis, dengan ruang analisis mencakup performativitas ritual, semiotik simbol, disiplin tubuh kolektif, penguasaan ruang publik, serta artikulasi ideologi Hakko Ichiu. Hasil kajian menunjukkan bahwa Seikerei beroperasi sebagai teknologi kekuasaan yang mendisiplinkan tubuh, mensakralkan ruang publik, dan memproduksi konsensus ideologis, sekaligus membuka ruang negosiasi lokal dan resistensi simbolik yang membuat hegemoni kolonial bersifat tidak pernah final dan senantiasa dikontestasikan. Paper ini berkontribusi secara konseptual pada kajian sejarah kolonial Indonesia dan studi agama dengan menyoroti peran ritual sebagai medium utama dalam produksi dan reproduksi kekuasaan, serta memperkaya teori kekuasaan dalam konteks kolonialisme Asia Timur.

Kata Kunci: Seikerei ; Shinto; teknologi kekuasaan; hegemoni budaya; kolonialisme simbolik; pendudukan Jepang di Indonesia.

1. PENDAHULUAN

Pendudukan Jepang di Indonesia pada periode 1942–1945 menandai transformasi penting dalam praktik kolonialisme di Asia Tenggara. Berbeda dari pola kolonialisme Belanda yang relatif memisahkan administrasi negara dari simbol-simbol religius pribumi, pemerintahan militer Jepang secara sistematis mengintegrasikan ideologi negara, praktik ritual, dan simbol keagamaan ke dalam strategi kekuasaannya. Integrasi ini tidak semata bertujuan menopang stabilitas politik, tetapi juga membentuk loyalitas dan kepatuhan melalui mekanisme simbolik yang bekerja pada tingkat kesadaran dan tubuh sosial masyarakat jajahan. Dalam konteks tersebut, kebijakan Seikerei , yakni kewajiban melakukan penghormatan ritual ke arah Kaisar Jepang, menjadi salah satu instrumen ideologis yang paling menonjol dalam proyek kolonial Jepang di Indonesia.

Seikerei ditempatkan sebagai praktik publik yang bersifat wajib dan melintasi berbagai ruang sosial, mulai dari sekolah, kantor pemerintahan, hingga ruang kerja dan upacara resmi. Melalui ritual ini, Kaisar Jepang direpresentasikan sebagai figur sakral yang melampaui otoritas politik biasa, sehingga kepatuhan terhadap pemerintahan militer dilekatkan pada dimensi moral dan religius. Dengan demikian, kekuasaan kolonial tidak hanya dijalankan melalui kontrol militer dan administratif, tetapi juga melalui produksi makna simbolik yang menormalisasi dominasi. Seikerei , dalam hal ini, berfungsi sebagai medium yang menghubungkan Shinto dengan politik kolonial dan membingkai ketaatan sebagai bagian dari tatanan kosmis yang dianggap sah.

Urgensi penulisan paper ini terletak pada kebutuhan untuk memahami pendudukan Jepang tidak hanya sebagai episode militer dan ekonomi, tetapi juga sebagai proyek ideologis yang bekerja melalui ritual dan simbol. Kajian historiografi mengenai periode ini cenderung menekankan aspek mobilisasi tenaga kerja, propaganda perang, dan kebijakan administratif, sementara dimensi ritual keagamaan sering kali diperlakukan sebagai pelengkap atau latar belakang. Padahal, praktik ritual seperti Seikerei justru membuka ruang analisis yang signifikan untuk menelaah bagaimana relasi agama dan kekuasaan dikonstruksi serta dioperasionalkan dalam konteks kolonial.

Paper ini menggunakan kerangka teoritis hegemoni budaya dari Antonio Gramsci untuk menjelaskan bagaimana dominasi kolonial dibangun melalui pembentukan konsensus ideologis dan internalisasi nilai, bukan semata-mata melalui paksaan koersif. Perspektif ini dipadukan dengan pemahaman agama sebagai instrumen politik, yang menempatkan praktik dan simbol keagamaan sebagai sarana legitimasi serta stabilisasi kekuasaan negara. Selain itu, konsep kolonialisme simbolik digunakan untuk menyoroti cara negara kolonial mensakralkan dirinya melalui ritual, sehingga kekuasaan tampil sebagai tatanan yang alamiah dan tak terelakkan. Dalam kerangka ini, Seikerei dipahami sebagai teknologi kekuasaan yang bekerja melalui disiplin simbolik, pengaturan tubuh, dan penguasaan ruang publik.

Meskipun sejumlah penelitian telah membahas kebijakan agama Jepang dan respons masyarakat Indonesia selama pendudukan, Seikerei umumnya dianalisis sebagai kebijakan administratif atau sumber konflik keagamaan. Pendekatan tersebut belum sepenuhnya mengkaji fungsi ritual ini sebagai mekanisme ideologis yang beroperasi pada level simbolik dan kultural. Kesenjangan penelitian inilah yang menjadi pijakan utama paper ini, khususnya dalam memahami bagaimana Seikerei berperan dalam proses sakralisasi negara dan pembentukan hegemoni budaya Shinto di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, fokus masalah paper ini adalah bagaimana Seikerei berfungsi sebagai teknologi kekuasaan dalam proyek kolonial Jepang, serta bagaimana ritual tersebut mengabstraksi dan normalisasi relasi kuasa melalui simbol dan praktik keagamaan. Tujuan penulisan ini adalah mendekonstruksi Seikerei sebagai praktik ritual-politik

dan menunjukkan perannya dalam membangun hegemoni budaya serta legitimasi kekuasaan kolonial. Secara teoritis, paper ini diharapkan memperkaya diskursus mengenai ritual dan kekuasaan dalam konteks kolonialisme. Secara historiografia, kajian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pendudukan Jepang di Indonesia dengan menempatkan agama dan simbolisme sebagai elemen sentral dalam dinamika kekuasaan kolonial.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi pustaka (library research) yang bersifat deskriptif-analitis. Data dikumpulkan dari sumber-sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan dokumen historis yang relevan dengan kebijakan Seikerei, State Shinto, serta pendudukan Jepang di Indonesia, termasuk karya-karya Aiko Kurasawa, Helen Hardacre, Robert Cribb, Prasenjit Duara, Takashi Fujitani, dan Mark R. Mullins sebagai basis data historis-empiris.

Analisis data dilakukan melalui pendekatan analisis wacana kritis (critical discourse analysis) yang dipadukan dengan kerangka teoritis ganda, yaitu teori kekuasaan Michel Foucault—khususnya konsep teknologi politik, disiplin tubuh, dan normalisasi—serta teori hegemoni budaya dan konsensus ideologis dari Antonio Gramsci. Kedua kerangka ini digunakan secara komplementer: perspektif Foucauldian menjelaskan mekanisme mikro-kekuasaan yang bekerja pada tubuh dan ruang, sementara perspektif Gramscian menjelaskan proses makro pembentukan konsensus dan hegemoni budaya.

Prosedur analisis dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, identifikasi dan kategorisasi data terkait praktik Seikerei dari sumber-sumber primer dan sekunder. Kedua, interpretasi data dengan memetakan performativitas ritual, semiotik simbol, disiplin tubuh kolektif, penguasaan ruang publik, dan artikulasi ideologi Hakko Ichiu sebagai unit analisis utama. Ketiga, sintesis teoretis yang menghubungkan temuan-temuan tersebut dengan konsep dekonstruksi hegemoni untuk menjawab fokus masalah penelitian. Keterbatasan penelitian ini terletak pada sifatnya yang berbasis kajian pustaka tanpa data lapangan primer (wawancara atau observasi langsung), sehingga interpretasi bersandar pada rekonstruksi historiografis dan teoretis atas sumber-sumber yang tersedia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Ritual Seikerei sebagai Teknologi Kekuasaan

Seikerei, dalam konteks pendudukan Jepang di Indonesia, berfungsi lebih dari sekadar ritual keagamaan formal. Ritual ini merupakan praktik disipliner yang secara sistematis mengatur tubuh dan gestur subjek kolonial. Kewajiban membungkuk ke arah Tokyo pada waktu tertentu menempatkan tubuh sebagai locus utama internalisasi kekuasaan, sehingga kepatuhan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga terwujud secara simbolik dan berulang dalam kehidupan sehari-hari (Foucault, 1995, hlm. 135–169).

Pengulangan Seikerei menghasilkan kebiasaan kepatuhan yang bersifat pra-reflektif. Gestur membungkuk yang terlihat sederhana memiliki dimensi politis karena menegaskan hierarki kekuasaan yang dianggap suci. Dalam konteks ini, tubuh tidak lagi bersifat netral, tetapi menjadi sarana di mana hubungan kekuasaan disematkan dan terus-menerus direproduksi (Foucault, 1995, hlm. 170–194). Sebagai alat kekuasaan, Seikerei beroperasi melalui proses normalisasi. Saat ritual menjadi elemen rutinitas institusi seperti sekolah dan lembaga pemerintah, ia kehilangan nuansa sebagai tindakan istimewa dan bertransformasi menjadi kewajiban sosial yang dianggap normal (Foucault, 1995, hlm. 195–228).

Ritual ini juga menggabungkan dimensi emosional dan simbolis ke dalam praktik kekuasaan. Melalui Seikerei, kesetiaan politik dikemas dalam istilah keagamaan yang mengaitkan kekuasaan negara dengan tatanan semesta (Mosse, 1975, hlm. 1–25). Dengan demikian, dominasi kolonial mendapatkan legitimasi simbolik yang melebihi logika kekuatan

militer. Seikerei menunjukkan bahwa kekuasaan kolonial Jepang tidak hanya bergantung pada perangkat represif, tetapi juga memanfaatkan mekanisme simbolik untuk membentuk subjek yang taat (Fujitani, 1996, hlm. 1–40).

Dengan menganalisis Seikerei sebagai teknologi kekuasaan, praktik ritual ini dapat dilihat sebagai sarana yang mengaitkan tubuh, simbol, dan ideologi. Seikerei berfungsi sebagai medium di mana kekuasaan kolonial beroperasi dengan halus tetapi efisien, menyusup ke dalam aspek fisik dan kognitif individu yang dijajah.

3.2. Hegemoni Budaya dan Konsensus Ideologis

Penerapan konsep hegemoni budaya dalam tradisi Gramscian memungkinkan pembacaan Seikerei sebagai praktik yang membentuk konsensus ideologis melalui pembentukan nilai-nilai bersama yang tampak alami. Hegemoni budaya di sini melibatkan dominasi yang dipertahankan melalui kesepakatan budaya, bukan paksaan fisik, di mana ritual Seikerei mengintegrasikan elemen keagamaan ke dalam struktur sosial kolonial (Kurasawa, 1993, hlm. 41–44). Konsensus ideologis dicapai ketika masyarakat menerima norma Jepang sebagai bagian dari identitas mereka, sehingga mengurangi konflik terbuka. Analisis ini menekankan bagaimana hegemoni bekerja secara halus melalui pembentukan kesadaran yang mendukung imperium.

Hegemoni budaya dalam Seikerei juga tampak pada upaya Jepang menyelaraskan ritual dengan narasi “Asia Raya”. Praktik ritual diposisikan sebagai bagian dari proyek ideologis yang lebih luas, di mana Jepang dikonstruksikan sebagai pemimpin spiritual dan politik kawasan (Mullins, 2012). Produksi konsensus melalui ritual keagamaan negara, bukan semata paksaan militer, terlihat dalam cara Seikerei menciptakan ilusi partisipasi sukarela (Gramsci, 1971, hlm. 12–14). Ritual seperti penghormatan bersama membangun solidaritas yang mengaburkan kepentingan kolonial, sehingga konsensus muncul dari pengalaman bersama. Hal ini berbeda dari pendekatan militer yang bergantung pada kekuatan, karena ritual membentuk ideologi yang dirasakan sebagai universal (Siswati, 2017, hlm. 11–33).

Lebih lanjut, konsensus ideologis diproduksi melalui pengulangan ritual yang menormalkan hierarki kolonial sebagai bagian dari budaya. Partisipan dalam Seikerei tidak hanya mengikuti aturan, tetapi juga mengadopsi nilai-nilai yang mendukung Jepang, sehingga menciptakan kesepakatan yang stabil (Hardacre, 1989, hlm. 108–113). Analisis Gramscian menunjukkan bahwa hegemoni ini rentan terhadap tantangan, namun dalam konteks kolonial, ritual justru memperkuatnya dengan mengaburkan batas antara penjajah dan yang dijajah. Ritual keagamaan negara juga memfasilitasi produksi konsensus dengan menggabungkan elemen lokal dan Jepang, sehingga ideologi tampak inklusif (Cribb, 1989). Secara keseluruhan, penerapan konsep ini menunjukkan Seikerei sebagai mekanisme dominan yang secara sistematis menghasilkan konsensus ideologis—bukan hasil pemaksaan, melainkan pembentukan budaya kolektif yang mendukung kolonialisme (Duara, 2003, hlm. 96–101).

3.3. Shinto sebagai Instrumen Politik Kolonial

Transformasi Shinto dari tradisi keagamaan lokal menjadi ideologi negara imperium merupakan proses yang memungkinkan penggunaannya sebagai instrumen politik dalam kolonialisme Jepang. Shinto, yang awalnya berbasis pada praktik ritual animistik, diadaptasi untuk mendukung ekspansi imperium, mengubahnya menjadi ideologi yang mensakralkan negara (Hardacre, 1989, hlm. 63–92). Dalam konteks ini, Shinto tidak lagi terbatas pada Jepang, melainkan dipromosikan sebagai norma universal bagi koloni seperti Indonesia.

Sakralisasi Tenno dan negara Jepang dalam konteks kolonial Indonesia melibatkan penghormatan Kaisar sebagai pusat otoritas absolut. Ritual Seikerei Mempromosikan Tenno sebagai figur sakral, di mana masyarakat Indonesia didorong untuk mengadopsi praktik penghormatan, sehingga menciptakan aura ketuhanan yang melampaui budaya lokal dan memperkuat loyalitas terhadap imperium (Hardacre, 1989, hlm. 93–120). Transformasi Shinto

juga melibatkan penggabungan elemen politik ke dalam ritual, sehingga agama menjadi sarana untuk melegitimasi kekuasaan kolonial dan mengaburkan batas antara keagamaan dan politik (Hardacre, 1989, hlm. 121–146).

Sakralisasi negara Jepang melalui Shinto juga menciptakan narasi kesatuan yang mendukung agenda kolonial. Ritual seperti pendirian altar Shinto di ruang publik menegaskan superioritas imperium dan mengurangi resistensi melalui pengalaman sakral (Fujitani, 1996, hlm. 69–102). Dengan demikian, Seikerei menegaskan bahwa Shinto berperan sebagai perangkat ideologis yang menopang kekuasaan kolonial sekaligus bahasa simbolik yang menghubungkan agama, negara, dan dominasi politik.

3.4. Kolonialisme Simbolik dan Sakralisasi Ruang Publik

Kolonialisme simbolik dalam Seikerei Terwujud melalui simbol-simbol yang digunakan untuk memperkuat dominasi, seperti gambar Kaisar atau bendera Jepang yang ditempatkan di ruang publik. Simbol ini tidak hanya bersifat dekoratif, melainkan medium untuk mengonstruksi otoritas sebagai sakral (Mosse, 1975, hlm. 26–55). Dalam konteks sekolah atau kantor, simbol-simbol ini membentuk lingkungan yang menegaskan hierarki kolonial dan mengubah ruang menjadi situs ritual.

Ruang seperti sekolah, kantor, dan lapangan menjadi arena sakralisasi melalui ritual Seikerei, di mana lokasi-lokasi ini diubah menjadi tempat penghormatan negara. Upacara harian di sekolah, misalnya, mengintegrasikan simbol Jepang ke dalam rutinitas, sehingga memperkuat kontrol simbolik (Mosse, 1975, hlm. 56–79). Waktu ritual juga berperan dalam kolonialisme simbolik, dengan pengaturan upacara pada waktu tertentu untuk menormalkan dominasi; ritual pagi hari atau peringatan nasional membentuk ritme harian yang selaras dengan agenda Jepang (Anderson, 2006, hlm. 47–65).

Seikerei Sebagai mekanisme penguasaan simbolik atas ruang sosial kolonial melibatkan transformasi lokasi menjadi situs otoritas. Lapangan umum digunakan untuk upacara massal yang memperkuat kesatuan, dan penguasaan ini bekerja secara halus melalui simbol yang tampak alami. Analisis ruang menunjukkan bahwa sekolah menjadi pusat sakralisasi, di mana siswa diajarkan untuk menghormati simbol Jepang, sehingga memperluas jangkauan kolonialisme simbolik ke generasi muda (Mosse, 1975, hlm. 80–105). Dengan demikian, kolonialisme simbolik melalui Seikerei Menguasai ruang sosial dengan mengintegrasikan ritual ke dalam kehidupan sehari-hari, menciptakan realitas kolonial yang stabil (Mosse, 1975, hlm. 106–130).

3.5. Dekonstruksi Relasi Kuasa dan Negosiasi Lokal

Ketegangan antara ideologi ritual Jepang dan sistem kepercayaan lokal muncul dalam interaksi Seikerei dengan agama seperti Islam atau animisme di Indonesia. Ideologi Shinto yang dipromosikan melalui ritual sering kali bertentangan dengan praktik lokal, sehingga menciptakan ruang bagi negosiasi (Kurasawa, 1993, hlm. 59–77). Masyarakat Indonesia menafsirkan ritual Jepang secara selektif dan menggabungkannya dengan kepercayaan mereka untuk mengurangi konflik, yang menunjukkan bahwa relasi kuasa bersifat dinamis, bukan statis.

Bentuk resistensi simbolik terlihat dalam penyesuaian ritual, di mana masyarakat mempertahankan elemen lokal sambil mengikuti aturan Jepang. Misalnya, penghormatan terhadap Kaisar dilakukan dengan cara yang selaras dengan norma Islam, sehingga menciptakan kepatuhan strategis. Resistensi ini bersifat simbolik dan mengindikasikan bahwa hegemoni tidaklah total (Kurasawa, 1993, hlm. 78–95). Kepatuhan strategis juga muncul sebagai respons terhadap ketegangan, di mana masyarakat mengadopsi ritual untuk menghindari sanksi namun tetap mempertahankan identitas, sehingga mengubah makna ritual asli (Scott, 1990, hlm. 183–201).

Ketegangan ini pada akhirnya memfasilitasi resistensi simbolik yang mengubah dinamika kolonial. Masyarakat Indonesia tidak pasif, melainkan aktif dalam negosiasi, sehingga

relasi kuasa perlu dipahami sebagai sesuatu yang interaktif (Scott, 1990, hlm. 246–270). Dengan demikian, dekonstruksi Seikerei memperlihatkan bahwa hegemoni budaya selalu bersifat tidak final; ritual menjadi arena kontestasi simbolik antara dominasi kolonial dan agensi lokal.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan di atas menegaskan bahwa Seikerei berfungsi sebagai mekanisme hegemonik yang bekerja melalui ritual, simbol, dan sakralisasi negara untuk mempertahankan dominasi kolonial. Dengan memposisikan Shinto sebagai instrumen politik, kebijakan ini tidak hanya mengontrol agama, tetapi juga membentuk konsensus ideologis yang mendukung imperium Jepang. Kontribusi analisis ini terhadap pemahaman relasi agama dan kekuasaan dalam sejarah kolonial Indonesia terletak pada pengungkapan dimensi simbolik dan ritual sebagai fondasi kekuasaan, yang melampaui narasi militer semata.

4. KESIMPULAN

Paper ini menegaskan bahwa ritual Seikerei dalam pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942–1945 berfungsi sebagai teknologi kekuasaan yang mengintegrasikan dimensi agama, simbol, dan politik dalam strategi kolonial imperium Jepang. Seikerei tidak dapat dipahami semata sebagai praktik keagamaan atau ekspresi budaya, melainkan sebagai mekanisme hegemonik yang dirancang untuk menata relasi kuasa secara halus melalui pendisiplinan tubuh, pengaturan gestur, serta pembentukan kepatuhan simbolik terhadap negara kolonial. Dengan menjadikan ritual sebagai medium politik, kekuasaan kolonial bekerja pada tingkat afektif dan kognitif, membentuk internalisasi dominasi tanpa ketergantungan eksklusif pada paksaan militer.

Secara konseptual, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Seikerei Berperan penting dalam produksi hegemoni budaya dan konsensus ideologis. Melalui sakralisasi Tenno dan negara Jepang yang berakar pada ideologi Shinto negara, ritual tersebut mengonstruksi legitimasi kekuasaan kolonial sebagai tatanan yang tampak alamiah dan transenden. Dalam kerangka ini, agama mengalami transformasi menjadi instrumen politik yang menopang stabilitas kekuasaan kolonial, sementara ritual berfungsi sebagai sarana reproduksi ideologi negara dalam praktik keseharian, terutama di ruang-ruang publik seperti sekolah, kantor, dan institusi administratif.

Namun demikian, kajian ini juga menekankan bahwa praktik hegemonik seperti Seikerei tidak pernah sepenuhnya tertutup dan deterministik. Pada tingkat lokal, penerapan ritual membuka ruang negosiasi, ambiguitas makna, dan bentuk-bentuk resistensi simbolik yang tidak selalu termanifestasi sebagai penolakan terbuka. Kepatuhan terhadap Seikerei kerap bersifat strategis dan situasional, mencerminkan interaksi kompleks antara ideologi kolonial dan sistem kepercayaan lokal. Hal ini menunjukkan bahwa relasi kuasa kolonial bersifat dinamis dan terus diproduksi ulang melalui interaksi simbolik antara penguasa dan yang dikuasai.

Dengan menempatkan ritual sebagai pusat analisis, paper ini berkontribusi secara teoritis dan historiografis pada studi pendudukan Jepang di Indonesia serta kajian relasi agama dan kekuasaan dalam konteks kolonial. Pendekatan ini memperkaya pemahaman tentang kolonialisme modern sebagai proyek yang tidak hanya bersandar pada aparatus material, tetapi juga pada pengelolaan makna, simbol, dan praktik sakral. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan adanya kajian lapangan (field research) yang menggali arsip lokal dan narasi lisan generasi pelaku sejarah guna memperkuat basis empiris atas negosiasi dan resistensi simbolik yang diuraikan dalam paper ini. Dengan demikian, analisis ritual Seikerei menawarkan lensa konseptual yang relevan untuk membaca konfigurasi kekuasaan kolonial dan pascakolonial lainnya, terutama dalam memahami bagaimana negara memobilisasi agama dan ritual sebagai fondasi hegemoni budaya.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, B. (2006). *Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism* (Revised ed.). Verso.
https://nationalismstudies.org/wp-content/uploads/2021/03/Imagined-Communities-Reflections-on-the-Origin-and-Spread-of-Nationalism-by-Benedict-Anderson-z-lib.org_.pdf
- Cribb, R. (1989). Japanese rule in Indonesia: Political and social dimensions. *Indonesia*, (48), 45–50. <https://doi.org/10.2307/3351043>
- Duara, P. (2003). *Sovereignty and authenticity: Manchukuo and the East Asian modern*. Rowman & Littlefield.
- Foucault, M. (1995). *Discipline and punish: The birth of the prison*. Vintage Books.
- Fujitani, T. (1996). *Splendid monarchy: Power and pageantry in modern Japan*. University of California Press.
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the prison notebooks* (Q. Hoare & G. N. Smith, Eds. & Trans.). International Publishers.
- Hardacre, H. (1989). *Shinto and the state, 1868–1988*. Princeton University Press.
- Kurasawa, A. (1993). *Mobilisasi dan kontrol: Studi tentang perubahan sosial di pedesaan Jawa 1942–1945*. Grasindo.
- Mosse, G. L. (1975). *The nationalization of the masses: Political symbolism and mass movements in modern Europe*. Howard Fertig.
- Mullins, M. R. (2012). State Shinto and religious nationalism. *Religion*, 42(2).
<https://doi.org/10.1080/0048721X.2012.642576>
- Scott, J. C. (1990). *Domination and the arts of resistance: Hidden transcripts*. Yale University Press.
- Siswati, E., & Universitas Islam Balitar. (2017). Anatomi teori hegemoni Antonio Gramsci. *Jurnal Translitera*, (4), 11–33. <https://doi.org/10.35457/translitera.v5i1.355>